Pilkada 2024, PDIP Cabup Gerindra Cawabup

SUKOHARJO (KR) - DPC PDIP Sukoharjo mendapat jatah mengusung nama calon bupati (Cabup) dan DPC Partai Gerindra Sukoharjo Calon Wakil Bupati (Cawabup) maju Pilkada 2024. Kesepakatan tersebut terjalin setelah dilakukan penandatanganan kerja sama di Kantor DPC PDIP Sukoharjo, Kamis (20/6). Selanjutnya masing-masing partai politik (parpol) tersebut tinggal menunggu rekomendasi dari DPP.

Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo Nurjayanto, mengatakan, pada posisi sekarang DPC PDIP Sukoharjo sudah memiliki tiga nama yang resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sukoharjo. Ketiganya yakni Etik Suryani, Agus Santosa dan Danur Sri Wardhana. Sedangkan di DPC Partai Gerindra Sukoharjo dua nama yakni Eko Sapto Purnomo dan Joko Paloma Santosa.

DPC PDIP Sukoharjo dan DPC Partai Gerindra sampai saat ini masih menunggu rekomendasi dari DPP siapa nama yang akan maju sebagai Bacabup maju di Pilkada 2024. Terkait kesiapan pemilu, DPC PDIP Sukoharjo dan DPC Partai Gerindra sudah melakukan penandatanganan kerja sama. Dalam kerja sama tersebut posisi Bacabup berasal dari DPC PDIP Sukoharjo. Sedangkan Bacawabup diberikan kepada DPC Partai Gerindra. "Posisi Cabup untuk PDIP dan Cawabup Partai Gerindra," ujarnya.

Posisi Cabup dan Cawabup tersebut ditekankan Nurjayanto sudah disepakati bersama dalam kerja sama antara DPC PDIP dan DPC Partai Gerindra Sukoharjo. Masing-masing partai tersebut akan memegang teguh kesepakatan yang sudah dilakukan. "Posisi sekarang masih Bacabup dan menunggu rekomendasi untuk maju Cabup di Pilkada 2024," lanjutnya.

DPC PDIP dan DPC Partai Gerindra Sukoharjo sepakat menjalin kerja sama maju Pilkada 2024. Penandatanganan kerja sama dilakukan di kantor DPC PDIP Sukoharjo, Kamis (20/6). Hasil dari kerja sama ditingkat DPC tersebut disampaikan ke pengurus DPP PDIP dan DPP Partai Gerindra menunggu kelanjutan kerja sama dan rekomendasi nama Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) .

Dalam penandatanganan kerja sama tersebut hadir Ketua DPC PDIP Sukoharjo Wardoyo Wijaya beserta jajaran pengurus partai. Selain itu, Bakal Calon Bupati (Bacabup) dari DPC PDIP sekaligus menjabat Bupati Sukoharjo Sukoharjo Etik Suryani. Hadir juga Pembina DPC Partai Gerindra Sukoharjo Bambang Riyanto, Ketua DPC Partai Gerindra Titik Suprapti, Bacabup dari DPC Partai Gerindra Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan jajaran pengurus dan fraksi Partai Gerindra.

Nurjayanto, mengatakan, awalnya dirinya bersama dengan Eko Sapto Purnomo yang sama-sama menjabat sebagai anggota DPRD Sukoharjo dan sekretaris partai politik menjalin komunikasi online. Dalam komunikasi tersebut disepakati untuk bertemu langsung di rumah makan di wilayah Solo Baru Kecamatan Grogol. Namun sampai saat waktu yang ditentukan tiba rencana pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan akhir. **(Mam)-d**

Partai Menengah Bikin Poros Tengah

KARANGANYAR (KR) - Tiga parpol berkursi pas-pasan di DPRD Karanganyar membentuk poros tengah pada Pilkada 2024, yakni PKS, PKB dan PAN. Mereka belum menyatakan sikap merapat ke kubu PDI Perjuangan atau Golkar. Gabungan tiga partai politik ini dipastikan mampu mengusung sendiri pasangan calon bupati wakil bupati pada pemilukada 27 November mendatang. Gabungannya sebanyak 12 kursi legislatif.

Dalam deklarasi tiga parpol ini untuk memenangkan Pilbup di Karanganyar, mereka menamakan diri Koalisi Kebersamaan. Para elite tiga parpol ini sepakat tak beralih ke lain kubu meski PDI Perjuangan dan Golkar yang berkompetisi memenangkan pemilu maupun pemilukada, mengajak berkoalisi. Para pimpinan tiga parpol menengah ini juga meneken kesepakatan bersama dalam membentuk Koalisi Kebersamaan.

Juru bicara Koalisi Kebersamaan, Darwanto mengatakan pertemuan ini akan menjadi sejarah Kabupaten Karanganyar tiga partai politik, PKS, PKB dan PAN berkumpul membentuk Koalisi Kebersamaan. Tiga partai sepakat untuk berperan aktif dalam Pilkada 2024. "Kami membuktikan ke publik, bahwa Koalisi Kebersamaan yang dibangun atas dasar kebersamaan. Tidak dibangun atas iming-iming mahar politik. Kami saling menghargai dan tidak memandang besar kecil kursi," kata Darwanto, Kamis (20/6).

Koalisi Kebersamaan ini menjawab keberadaan partai poros tengah bakal berdiri untuk memenangkan Pulbup. Parpol menengah juga tak hanya mengikuti arus parpol penguasa pemerintahan. Koalisi ini ibarat jilid dua saat PKS dan PKB bersama mengusung Rohadi Widodo dan Ida Retno Wahyuningsih (Ro-Da) pada Pilbup Karanganyar 2018. Saat itu Ro-Da kalah tipis dengan pasangan Juliyatmono-Rober Christanto.

Ketua DPC PKB Karanganyar Sulaiman Rosyid mengatakan komunikasinya dengan PAN dan PKS untuk bergabung memenangkan Pilbup 2024 sudah intens sejak ramadan kemarin. Kemudian berlanjut sampai menemui kesepahaman Koalisi Kebersamaan. Mengenai calon bupati wakil bupati yang akan diusung, PKB siap menyodorkan nama-nama yang masuk penjaringannya.

Ketua DPD PAN Karanganyar Sri Sumarti mengatakan koalisi terbentuk bukan serba mendadak. Namun sudah menjalin komunikasi bersama dengan visi yang sama. PAN berkomitmen bersama Koalisi Kebersamaan siap memenangkan Pilkada Karanganyar 2024.

Ketua DPD PKS Karanganyar Anwar Susilo mengatakan tiga partai dalam Koalisi Kebersamaan menginginkan untuk mengusung cabup dan cawabup dari partai poros tengah. Kerja sama ini dibangun atas kesamaan cara pandang, visi untuk kemajuan Karanganyar. Saat ini, PKS telah menetapkan tiga kandidat internal yang akan ditawarkan dalam Koalisi Kebersamaan. Selain itu juga ada 11 nama tokoh luar PKS yang siap ditawarkan. **(Lim)-d**

KPU Sukoharjo Verfak Calon Perseorangan

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo melaksanakan tahapan lanjutan verifikasi faktual (Verfak) pasangan bakal Calon Bupati (Bacabup) Tuntas Subagyo dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) R Djayendra Dewa melalui jalur perseorangan Pilkada 2024. Kegiatan dimulai 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Tahapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya lolos verifikasi administrasi (Vermin).

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, Jumat (21/6) mengatakan, Verfak akan dilakukan oleh KPU Sukoharjo dengan melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di semua wilayah. KPU Sukoharjo melaksanakan Verfak terhadap calon perseorangan yang akan maju Pilkada 2024 sesuai dengan petunjuk dari KPU RI. Dalam surat edaran nomor 959.PL.03.2-SD pada 15 Juni 2024.

Isi surat edaran dari KPU RI dijelaskan bahwa setiap petugas yang memiliki id card verifikator agar mendatangi orang-orang atau pendukung calon perseorangan. Kegiatan dilakukan dengan datang ke rumah sesuai alamat orang pendukung calon perseorangan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan nantinya petugas verifikator harus memastikan bisa bertemu dengan orang atau pendukung calon perseorangan tersebut. Apabila orang tersebut tidak bisa ditemui maka petugas akan berkoordinasi dengan narahubung untuk bisa dikumpulkan ke PPS atau tempat yang disepakati. "Apabila cara tersebut belum bisa maka Verfak bisa dilaksanakan oleh petugas verifikator dengan menggunakan teknologi informasi atau telepon dan disaksikan oleh Bawaslu Sukoharjo yang difasilitasi narahubung," ujarnya. **(Mam)-d**

BUNTUT PERPANJANGAN MASJAB KADES

BPD Pati Minta Penambahan Masa Bhakti

PATI (KR) - Pelantikan 385 kepala desa di Kabupaten Pati yang menerima perpanjangan masa jabatan dua tahun, mendapat tanggapan serius dari organisasi Badan Permusyawaratan Desa. BPD meminta agar Pemkab Pati memberikan pelayanan administrasi (protokoler) yang sama. Yakni menambah masa bhakti dua tahun secara otomatis.

"Kami sudah mengirim surat masalah penambahan masa bhakti BPD ke Pemkab Pati. Ini, kami masih menunggu konfirmasinya. Namun kalau Pemkab Pati tidak ada tanggapan, maka anggota BPD akan melakukan demo secara besar-besaran". Demikian ditegaskan Wakil Ketua Lembaga Konsultasi Dan Koordinasi BPD Pati, Budi Antoro, Jumat (21/6). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa, dalam Permendagri Nomor 110/2016 mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menurut Budi Antoro, penyerahan SK perpanjangan jabatan kades di Pendopo Kabupaten Pati, sudah didasarkan payung hukum yang jelas. Maka BPD menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi. Namun harus dicatat, tambahnya, BPD juga termuat di undang-undang yang mengatur soal perpanjangan masa jabatan kades. "Sehingga BPD juga minta diperlakukan yg sama. Karena secara garis struktur organisasi kedudukan BPD adalah sejajar dengan kepala desa" tegas Budi Antoro. Selain itu, tambahnya, pemberian SK BPD jangan lagi didelegasikan kepada Camat. Namun harus langsung dari bupati. "Kalau nanti SK BPD diserahkan camat lagi, maka BPD dengan akan menolak. Karena hal itu merupakan bentuk diskriminasi. Kami meminta hak protokoler administratif yang sama," ucap Waket LKK BPD Pati.

Sebanyak 385 kepala desa di Kabupaten Pati menerima perpanjangan masa jabatan, di Pendopo Pati, Kamis (20/6). Perpanjangan masa jabatan kades setelah DPR RI dan Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. Dalam aturan itu, masa jabatan kades semula 6 tahun berubah menjadi 8 tahun. **(Cuk)-d**

KR-Alwi Alaydrus

Suasana pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades di Pati.

Pemeriksaan Kesehatan Wanita Penghibur

BANYUMAS (KR) - Sebanyak 29 wanita penghibur di kawasan wisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah yang ngekos di sejumlah rumah warga, Kamis (20/6) sore menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari program rutin yang dilaksanakan oleh Puskesmas Baturraden II, setiap tiga bulan sekali.

Programer HIV dari Puskesmas Baturraden II, Sismiati Andriani, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk deteksi dini HIV/ AIDS tetapi juga untuk memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit menular seksual lainnya.

"Kami bekerja sama dengan pihak desa dan kades Posyandu untuk mengidentifikasi penghuni kos dalam rangka pemeriksaan di Posyandu setempat," ujarnya. Pada pemeriksaan kali ini, fokus diberikan kepada 29 wanita penghuni kos di RT 5 RW 2, Desa Karangmanggu. Hasilnya menunjukkan bahwa semuanya dinyatakan negatif terhadap HIV. Namun, ada satu orang ditemukan positif penyakit sipilis.

KR-Driyanto

Petugas kesehatan Puskesmas Baturraden II melakukan pemeriksaan penghuni kos.

Untuk wanita yang diketahui mengidap sipilis langsung diberi pengobatan, dan dilarang untuk beroperasi.

"Andaikata ditemukan hasil positif, kami langsung memberikan pengobatan untuk mengatasinya," tambah Sismiati. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan edukasi tentang pentingnya menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Baturraden dikenal sebagai salah satu kawasan wisata dengan sejumlah tempat hiburan malam dan lokalisasi, yang meningkatkan potensi penyebaran virus HIV/AIDS.

Dengan adanya kegiatan rutin seperti ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual di masyarakat kawasan tersebut.Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan pemeriksaan kesehatan dan upaya pencegahan HIV/ AIDS di Baturraden, masyarakat dapat menghubungi Puskesmas Baturraden II. **(Dri)-d**

Kemhan RI Sosialisasikan Regulasi Bela Negara

SEMARANG (KR) - Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementrian Pertahanan RI melakukan Sosialisasi Regulasi Pembinaan Bela Negara di Jateng dalam rangka mengatur langkah koordinasi pelaksanaan pembinaan bela negara yang dilakukan Kementrian dan Lembaga Pemerintah, TNI/Polri serta komponen bangsa di daerah.

Hal tersebut menurut Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemenhan RI, Brigjen TNI Eko Sunarto SPd MSi yang hadir mewakili Dir Pothan Mayjen TNI Piek Budyakto, bahwa selama ini pelaksanaan pembinaan Bela Negara di daerah belum semua terlaporkan kepada Kementrian Pertahanan yang dalam hal ini Direktorat Potensi Pertahanan sebagai leading sektornya.

"Sosialisasi program ini sangat urgen, kami mengevaluasi karena tidak dapat informasi data laporan terkait pembinaan kesadaran bela negara. Kami sangat yakin sudah melaksanakan pembinaan Bela Negara tapi lupa melaporkan kepada Kementrian Pertahanan yang ditunjuk sebagai leading sektor dari pembinaan kesadaran bela negara. Perpres No 115 tentang Kebijakan Kesadaran Bela Negara di Kemhan merupakan Pedoman Pembinaan. Perpres ini mengatur tugas dan fungsi masing-masing Kementwrian dan Lembaga," jelas Eko Sunarto, Kamis (20/6).

Sebagai penyelenggara misalnya Kementrian Dalam Negeri, dalam menyelenggarakan Kesadaran BN tidak punya pemateri maka bisa meminta bantuan (koordiasi) dengan Kementrian atau Lembaga lain yang terkait, misalnya kerjasama dengan BNPN, BNN serta Pemerintah Daerah tentang materi kearifan lokal. Jadi ini betapa pentingnya koordinasi.

Kesadran Bela Negara menurutnya menjadi tanggungjawab bersama. Sesuai misi pemerintah pembinaan Bela Negara ini adalah bagian dari menuju Revolusi Mental. " Ada 3 lingkup di dalam pembangunan kesadaran Bela Negara, yakni lingkup Pendidikan, Pekerja dan Masyarakat,î imbuh Eko Sunarto. Sosialisai Regulasi Pembinaan Bela Negara menurutnya mengacu pada UUD 1945 pasar 27 ayat 3 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

"Mencermati pesatnya perkembanagan dinamika strategis, baik di dalam maupun luar negeri telah mengubah potensi ancaman menjadi semakin komplek dan multi dimensional. Maka upaya bela negara semakin dibutuhkan untuk meningkatkan kesiap siagaan dalam melindungi kediaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Dengan disahkan UU No 23 Th 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Kementrian Pertahanan selaku leading sektor Bela Negara wajib mensosilasikan regulasi turunan yang terkait bela negara kepada seluruh kementrian dan lembaga pemerintahan daerah termasuk TNI / Polri serta komponen bangsa lainnya. Dengan harapan terwujudnya komintmen bersama serta sinerginas dalam melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara di seluruh Indonesia,î ungkap Dirjen Pothan dalam sambutan yang dibacakan Direktur Bela Negara, Brigjen TNI Eko Sunarto. **(Cha)-d**

KR-Chandra AN

Dir Bela Negara Pothan Kemenhan RI bersama Stake Holder foto bersama usai pembukaan Sosialisi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Metro Park Hotel Semarang.

Kadus Keyongan Mangkir Panggilan Kejari Boyolali

BOYOLALI (KR) - Dwi Purnomo alias Ipung Kepala Dusun (Kadus) 7 Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terlibat kasus korupsi dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan juta rupiah. Semestinya Dwi Purnomo dipanggil untuk datang ke Kejari Boyolali pada Kamis pukul 10.00 WIB. Namun, hingga pukul 17.00 WIB, Dwi tak juga datang memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Boyolali.

"Sebenarnya agenda pada Kamis (20/6/2024) adalah penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke jaksa penuntut Kejari Boyolali. Selanjutnya, tersangka sedianya langsung ditahan dan dititipkan di Rutan Boyolali.Akan tetapi hingga pukul 17.00 WIB Dwi Purnomo alias Ipung tidak memenuhi panggilan untuk proses penyerahan tersangka dan barang bukti,î ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Boyolali, Romli Mukayatsyah mewakili Kajari Boyolali, Tri Anggoro Mukti, Jumat (21/6).

Romli mengatakan kasus penggelapan yang dilakukan Dwi Purnomo berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp400 juta. Namun, khusus untuk tersangka Dwi Purnomo, nilai kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 109 juta. Romli menjelaskan modus yang digunakan tersangka yakni dengan tidak menyetorkan uang hasil penarikan PBB ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Uang itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi.

Kasus dugaan korupsi ini terungkap berawal dari salah seorang warga setempat yang berencana melakukan jual beli tanah. Dalam proses administrasinya, warga tersebut terganjal tunggakan pajak yang belum dibayarkan selama kurun waktu tiga tahun mulai 2015 sampai 2018. Sementara warga bersangkutan mengaku selalu patuh membayar PBB.

Pelaku dalam kasus ini diperkirakan tidak hanya satu orang. Kejari Boyolali sudah memeriksa satu orang lainnya yang diduga juga menyelewengkan dana penarikan PBB di Keyongan, Nogosari, dan sudah masuk tahap penyidikan. Namun orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka.

Hampir sama dengan Dwi Purnomo, potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan kadus tersebut juga sekitar Rp100 juta. Korupsi penarikan uang PBB itu diduga dilakukan sejak 2015 hingga 2018. "Tersangka dalam hal ini dijerat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 64 KUHP." kata Romli. **(Mul)-d**